

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berbagai uraian telah dipaparkan dan dijelaskan oleh peneliti, sehingga terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan oleh peneliti, diantaranya :

1. Kota Surabaya menjadi kota terpadat di Jawa Timur dengan angka kendaraan tertinggi dibanding kabupaten atau kota lainnya. Dengan jumlah tersebut, menjadi peluang dari pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor parkir. Untuk mengantisipasi praktik pungutan liar dan kebocoran dalam keuangan parkir, Dinas Perhubungan menerapkan pembayaran parkir nontunai dengan menggunakan alat parkir meter. Terbatasnya sumberdaya yang dimiliki, tidak menjadi penghalang untuk *E-Parking* berperan dalam optimalisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Surabaya. Alat ini tersedia hanya dua tempat parkir dari 1438 titik parkir di Kota Surabaya. Parkir meter ini menjadi investasi jangka panjang, selain menjadi alat untuk meminimalisir kebocoran juga berfungsi sebagai media peningkatan literasi digital dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
2. Kebijakan parkir meter ini bukan hanya memandang bagaimana cara pemerintah agar dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh, akan tetapi juga memikirkan sisi-sisi yang lain seperti peningkatan kualitas pelayanan, literasi digital bagi masyarakat, sumber daya manusia, dan tingkat kesejahteraan dari juru parkir yang bertugas. Mengingat tingkat partisipasi pengguna parkir yang mengoperasikan parkir meter masih sedikit. Upaya mewujudkan *good governance* di Kota Surabaya, perlu adanya kontribusi dan partisipasi dari berbagai pilar salah satunya masyarakat, apabila hanya salah satu pilar yang bekerja keras tanpa ada bantuan dari pilar yang lain, maka kebijakan ini akan menemui kegagalan.
3. *Good Governance* menjadi gambaran dari tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, dan memperhatikan nilai-nilai keislaman. Melalui penggunaan parkir meter, terdapat kontrak kerja yang membuat pendapatan dari juru parkir terjamin dan tinggal fokus pada pelayanan parkir. Kontrak

kerja ini mendorong juru parkir untuk bersikap profesional dan amanah dalam menjalankan tugas. Salah satu tugas juru parkir untuk mempromosikan dan mengarahkan pengguna parkir untuk menggunakan parkir meter, akan tetapi dengan kebijakan baru membuat juru parkir jarang mengedukasi masyarakat sehingga pengguna tidak memiliki ketertarikan untuk mempelajari cara pengoperasiannya. Hal ini berpengaruh pada faktor *good governance* yaitu orientasi jangka panjang dari program tersebut, partisipasi dan sikap tanggung jawab dari juru parkir yang bertugas di lapangan.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa implikasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, masyarakat, maupun pihak yang terkait, terutama dalam konteks penerapan nilai-nilai keislaman dalam *good governance* di sektor parkir, pandangan tentang implikasi ini dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya :

### **1. Implikasi Teoritis**

Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang konsep *good governance* yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan efisiensi, tetapi juga berakar pada nilai-nilai keislaman seperti amanah (kepercayaan), adil (keadilan), dan kejujuran. Dalam konteks kebijakan parkir meter, prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam upaya pemerintah menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, menekan praktik pungutan liar, serta memberikan jaminan pendapatan yang layak bagi juru parkir.

Temuan di penelitian menegaskan bahwa *good governance* yang islami tidak sekadar berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab moral serta memperkuat teori bahwa penerapan sistem digital dalam pelayanan publik dapat mengurangi praktik pungutan liar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## 2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penggunaan *E-Parking* di sektor parkir Kota Surabaya. Terbatasnya sumber daya mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih inovatif untuk menggunakan sistem parkir elektronik yang lainnya agar potensi retribusi parkir akan maksimal. Selain itu, diperlukan program pelatihan bagi juru parkir agar mereka mampu beradaptasi dengan sistem digital dan berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang cara penggunaan parkir meter. Implikasi ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mewujudkan tata kelola perparkiran yang transparan, profesional, dan berkeadilan. Pembiasaan penggunaan sistem nontunai dapat memperkuat etika kerja islami yang menolak praktik kecurangan dan menumbuhkan budaya profesionalisme yang berintegritas

## 3. Implikasi untuk penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan parkir meter, baik dari sisi sosialisasi, kemudahan teknologi, maupun kepercayaan terhadap sistem pembayaran digital. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas fokus pada aspek kesejahteraan juru parkir dan efektivitas sistem nontunai di berbagai wilayah kota lain, sehingga dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan *smart parking* dalam mendukung *smart city* di Indonesia.

Selain itu, studi lanjutan dapat menilai bagaimana literasi spiritual dan moral aparatur pemerintah maupun masyarakat berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan kebijakan berbasis teknologi digital yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*).

## C. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah ditemukan dan diperoleh oleh peneliti, terdapat saran yang dikemukakan peneliti agar dapat berkontribusi

dalam peningkatan program *E-Parking* di Kota Surabaya dan dapat menjadi *Spotlite* atau referensi dari penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Meningkatnya jumlah kendaraan tentu menjadi peluang dalam sektor parkir untuk optimalisasi penerimaan retribusinya. UPT Parkir Dinas Perhubungan seharusnya meningkatkan pengawasan dan mengatasi adanya pungutan liar maupun kebocoran dalam setoran retribusi. Memberantas hal tersebut di Surabaya memang sangat sulit dan belum membuahkan hasil yang signifikan, tetapi upaya dan evaluasi dari Dinas Perhubungan harus dilakukan secara konsisten. Inovasi yang dilakukan salah satunya pembayaran nontunai, namun Dinas Perhubungan juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Maka dari itu, sistem dari sosialisasi dan kampanye terkait *E-Parking* ini harus ditingkatkan sehingga mampu menarik perhatian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran nontunai ini.
2. Evaluasi dan peningkatan terkait edukasi serta arahan harus segera dilakukan dalam pengoperasian parkir meter, bukan hanya dari sistem melainkan dari sumber daya manusia juga. Kebijakan alternatif yang dikeluarkan memang membawa dampak positif untuk retribusi parkir tetapi tidak untuk sisi lain. Kebijakan baru tersebut meningkatkan angka penggunaan parkir meter, juru parkir melek teknologi, tapi tidak membawa dampak positif yang signifikan bagi pengguna parkir yang mengoperasikannya. Kebijakan tersebut membuat seluruh transaksi yang tercatat di sistem parkir meter adalah hasil dari kerja juru parkir bukan pengguna parkir. Kebijakan ini murni bukan tanggung jawab pemerintah saja melainkan dari kontribusi masyarakat juga sebagai pilar dari tata kelola pemerintahan.
3. Memfokuskan petugas parkir menjadi salah satu cara untuk meningkatkan sosialisasi, ada yang fokus edukasi atau arahan kepada pengguna serta ada petugas parkir yang fokus pada pelayanan dan penataan parkir. Adanya Gaji yang tetap serta penilaian setiap tahunnya, seharusnya menambah semangat dari juru parkir agar lebih bertanggung jawab dan jujur dalam bertugas sehingga mampu bersikap amanah bagi pihak lainnya. Pengawasan

ditingkatkan dari pengawas parkir yang memonitoring kinerja dari juru parkir, jika juru parkir tidak melakukan sebagaimana mestinya akan mendapatkan teguran dari pengawas parkir, sehingga tujuan dari *E-Parking* yaitu mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam merealisasikan suatu perubahan dapat tercapai.